



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 131, Juni 2020



Peringatan Hari Lahir Pancasila	2
Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi COVID-19	3
Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber Sarasehan kebangsaan	4
Agus Widjojo: Berbicara Tentang Sistem Keamanan, Tidak Bisa Lepas dari Hakikat Hubungan Sipil-Militer	5
Menko Polhukam: Indonesia Menghadapi Situasi Luar Biasa.....	6
Agus Widjojo: Tugas pemimpin adalah Mencapai Tujuan Bersama	7
Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru, Presiden Beri Lima Arahan.....	8
Pancasila sebagai Obat Penawar Gerakan Radikal dan Terorisme	9
Sektor Perdagangan Guna Memajukan Perekonomian Nasional	10
Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan Sosial	11

Agus Widjojo: Berbicara Tentang Sistem Keamanan, Tidak Bisa Lepas dari Hakikat Hubungan Sipil-Militer

Peringatan Hari Lahir Pancasila



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 secara daring (daring), Senin (1/6). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah Pandemi COVID-19 ini menguji daya juang sebagai bangsa, menguji pengorbanan, menguji kedisiplinan, menguji kepatuhan, dan menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

"Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuror untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita

untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi," jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah dan menjadi nilai yang bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

Mengangkat tema "Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Indonesia Maju", Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara baik pusat dan daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Nilai-nilai Pancasila harus menjadi nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah dan menjadi nilai yang bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling bergotong royong, dan selalu optimis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pemenang dalam menghadapi tantangan yang menghadang.

"Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu," ujar Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu optimis dan menjadikan momentum ini sebagai lompatan kemajuan untuk menjadi bangsa yang kuat. "Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita, kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, mari kita terus memperkokoh persatuan, mari kita peduli dan berbagi untuk sesama, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat," tutup Presiden.

Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi COVID-19

Kita akan dapat mengatasi Pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Senin, (1/6) 2020.

Saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19 misalnya dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila yaitu efektivitas pemerintahan yang didukung kepercayaan dan kepatuhan rakyat pada semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri juga dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan.

Nilai-nilai lain yang mencerminkan kearifan lokal dan terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tidak hanya menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan ketahanan nasional. “Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19,” ujar Agus.



Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), isolasi lokal, larangan berpergian, serta pemberian

bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak.

Menurut Agus, berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakekatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional.

“Oleh karena itu, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri, yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila,” pungkas Agus.

Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber Sarasehan Kebangsaan



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menjadi salah satu narasumber pada Sarasehan Kebangsaan Collab4Unity yang mengangkat tema “Amplifikasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Tameng Bangsa Menghadapi Tantangan dan Dampak Covid-19” pada Selasa (2/6).

Pada sarasehan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring) tersebut, Agus menyampaikan bahwa ditengah pandemi Covid-19, Lemhannas RI terus menjalankan tugas dan peran sesuai dengan kewenangan konstitusional yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional. Dalam menjalankannya, Lemhannas RI memang melakukan inovasi dan improvisasi yakni sepenuhnya melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring).

“Hal tersebut tidak mengurangi kualitas program pendidikan. Karena diyakini bahwa efektivitas proses belajar mengajar dalam sebuah program pendidikan implementasi sebuah kurikulum tidak ditentukan oleh

tenaga pengajar, tetapi bagaimana para peserta mengejar ilmu,” Jelas Agus.

Menurut Agus, Ketahanan nasional bukan merupakan disiplin ilmu sendiri, sebetulnya merupakan outcome upaya dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ia mengatakan bahwa ketahanan nasional adalah sebuah kondisi yang diperlukan agar bisa mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Dalam mewujudkan ketahanan nasional, dibutuhkan dua pendekatan yaitu pendekatan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dan pendekatan spasial geografis yakni gatra tiap-tiap provinsi.

Selanjutnya Agus menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan nasional diperlukan kebijakan yang berdasarkan pengetahuan dalam merumuskan kebijakan dan kompetensi. Selain itu, Agus menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat harus berdasarkan Empat Konsensus Dasar Bangsa. “Segala sesuatu kebebasan yang berasal diluar konsensus dasar, perlu kita

curigai sebagai upaya untuk merubah konsensus dasar,” tegas Agus.

Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa mengukur nilai-nilai Pancasila harus dari wujud konkret yang dapat diukur dari lapangan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Mencari wujud konkret nilai-nilai Pancasila dengan terukur, dapat diwujudkan dengan mencari indikator-indikator terukur, yakni harus konkret dan nyata, berdasar kerangka pengetahuan, menilai dengan jujur, dan terdapat nilai integratif antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Menurut Agus, jangan mengukur nilai hanya dari nomenklatur yang sifatnya abstrak atau idealis normatif.

“Kemudian diperbandingkan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi nyata di lapangan,” kata Agus. Dengan memperbandingkan dua kondisi tersebut, dapat terlihat implementasi dari sila-sila Pancasila dalam keadaan baik, cukup baik, kurang, atau keadaan lainnya.

Agus Widjojo: Berbicara Tentang Sistem Keamanan, Tidak Bisa Lepas dari Hakikat Hubungan Sipil-Militer



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo saat memberikan materi kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61, Senin (8/6). Ceramah yang mengangkat topik "Sistem Keamanan Nasional" bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan sistem keamanan nasional di Indonesia.

Dalam ceramah tersebut, Agus menyampaikan bahwa keamanan regional dan keamanan bersama berhubungan dengan hubungan antarbangsa. Keamanan nasional dibagi menjadi keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus didasarkan pada hukum. "Kalau pendekatan hukum untuk memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat tidak bisa efektif maka situasi bisa berkembang menjadi gangguan keamanan dalam negeri," tutur Agus.

Selanjutnya, Agus mengatakan bahwa sistem keamanan tidak dapat dipisahkan dari hakikat hubungan sipil-militer. "Agus menjelaskan bahwa

sipil dan militer adalah tatanan dimana kebijakan dirumuskan oleh sipil dan dalam pelaksanaan fungsi pertahanan dilakukan oleh militer sebagai organisasi profesional. Hubungan sipil-militer pada hakikatnya merupakan alur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan fungsi pertahanan nasional dalam sistem politik. "Berawal dari perumusan kebijakan oleh otoritas politik sipil dan berakhir dengan pelaksanaan kebijakan oleh militer," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan perbedaan peran otoritas sipil dan otoritas militer. Peran otoritas sipil yang pertama adalah merumuskan kebijakan yang bersumber dari kebijakan nasional. Pengambilan keputusan pengerahan militer didasarkan pada kebijakan pemerintah yang dalam hal ini presiden.

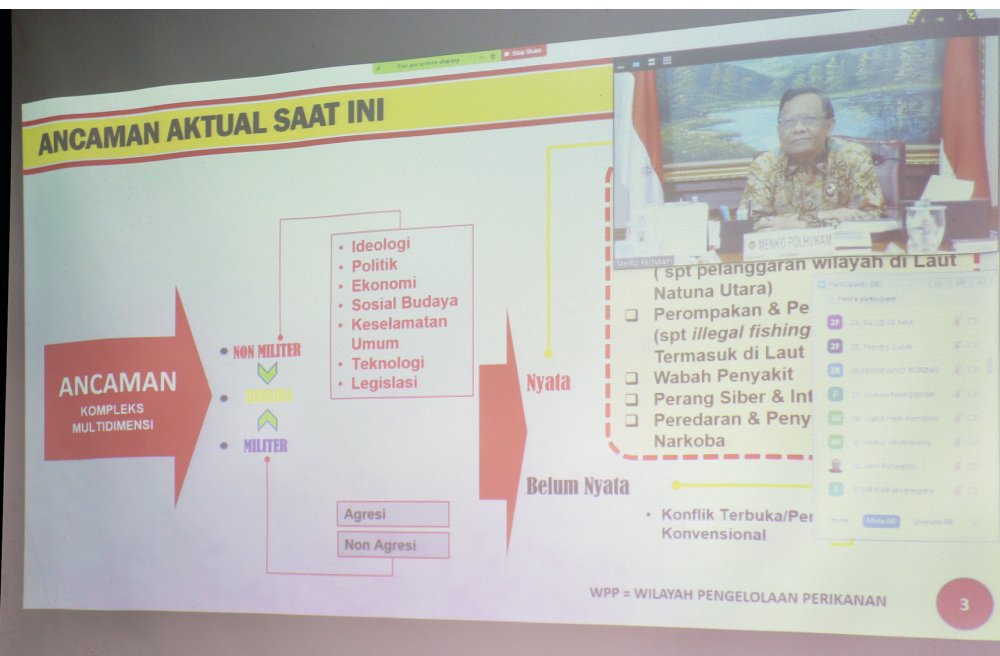
Peran otoritas sipil selanjutnya adalah membuat keputusan pengerahan militer dengan menentukan sasaran, menentukan strategi nasional, serta melakukan kontrol demokratis dan pengawasan. Sedangkan peran otoritas

militer adalah menentukan strategi/cara militer untuk mencapai tujuan politik, mematuhi UU dan loyal kepada otoritas politik dan melaksanakan manajemen internal untuk jamin kesiapan operasional.

Pada penghujung materinya, Agus menyarankan pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebagai badan pembantu pengambilan keputusan presiden di tingkat pusat. Namun badan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan pemegang otoritas politik kekuasaan eksekutif.

Dewan Keamanan Nasional disarankan diketuai oleh Presiden dan memiliki anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap diisi oleh Menteri Koordinator, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menteri Keuangan, Kepala Polisi RI, dan Panglima TNI. Sedangkan anggota tidak tetap diisi oleh anggota kabinet dan pejabat Lembaga Non Kementrian.\

Menko Polhukam: Indonesia Menghadapi Situasi Luar Biasa



Kini Indonesia mulai memasuki masa adaptasi kebiasaan baru menuju fase masyarakat produktif dan aman dari Covid-19

Moh. Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD memberikan ceramah tentang “Kebijakan Keamanan Dalam Negeri di Tengah Pandemi Covid-19” kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Senin (8/6) secara dalam jaringan (daring).

Dalam ceramahnya, Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada satu pun negara yang tidak gagap menghadapi Covid-19. Namun ia mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dan lambat dalam bertindak.

Beberapa langkah yang diambil adalah menghentikan penerbangan Indonesia dan Tiongkok lima hari setelah pelaksanaan *lockdown* di Wuhan, menjemput dan mengkarantina WNI yang berada di Wuhan pada 1 Februari 2020 lalu, membentuk rumah sakit khusus, dan melakukan penguatan di daerah-daerah melalui puskesmas dan poliklinik di seluruh Indonesia.

Awalnya, jelas Mahfud, cepatnya penyebaran Covid-19 dikarenakan keterbatasan SDM dan laboratorium, keterbatasan alat kesehatan, serta kurang disiplin dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan.

Oleh karena itu, setelah gugus tugas terbentuk banyak langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa langkah tersebut adalah sosialisasi protokol kesehatan seperti *physical distancing*, kewajiban memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan larangan berpergian.

Selain itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah juga mengubah APBN 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 untuk diarahkan kepada penanganan dampak Covid-19, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

Kini Indonesia mulai memasuki masa adaptasi kebiasaan baru menuju

fase masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. “Artinya masyarakat boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan,” tutur Mahfud MD.

Mahfud MD juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi luar biasa, dimana satu sisi harus mengatasi masalah negara secara umum dan di sisi lain harus menghadapi pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada berbagai sektor. Kondisi tersebut memang dihadapi oleh hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia.

Indonesia diharapkan mampu mengatasi pandemi Covid-19 dan mampu memulihkan ekonomi sehingga tidak berdampak pada krisis ekonomi yang akan mengakibatkan krisis sosial. Maka, kebijakan saat ini adalah menerapkan hidup produktif dan aman dari Covid-19 sehingga diharapkan Indonesia mampu keluar menjadi pemenang.

Agus Widjojo: Tugas Pemimpin adalah Mencapai Tujuan Bersama



Pada akhirnya tugas pemimpin adalah mencapai tujuan bersama

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah dengan topik "Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi Yang Profesional, Berintegritas, dan Unggul guna Menjamin Keamanan Nasional dan Ketertiban dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional" kepada peserta Sespimti Polisi RI, pada Rabu (10/6) secara dalam jaringan (daring).

Dalam ceramah yang berfokus materi pada wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional, Agus mengatakan bahwa tidak semua kebijakan dapat memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus merujuk pada beberapa aspek, yakni kesepakatan bangsa, perjalanan sejarah, serta budaya dan peradaban.

Kesepakatan bangsa sendiri, lanjut Agus, diikat oleh empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai kebangsaan, yakni wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Selain kesepakatan bangsa, aspek perjalanan sejarah juga dibutuhkan. Agus mengatakan bahwa transformasi perjalanan Indonesia masa lalu ke masa kini bahkan masa depan harus bersifat gradual dan bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah proses bersifat transisional dan tidak bersifat absolut.

Aspek yang tidak kalah penting adalah aspek budaya dan peradaban yang menstransformasikan tatanan berdasarkan perjalanan sejarah menjadi tatanan yang diharapkan. Menurut Agus, untuk merubah budaya dan peradaban yang sudah tertanam sejak lama tidak mudah. Namun, semua tergantung pada mindset.

Membahas wawasan nusantara, Agus menyampaikan bahwa peserta setelah menyelesaikan pendidikan dan menduduki suatu jabatan diharapkan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik yang memberikan implikasi positif untuk kepentingan publik dan bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

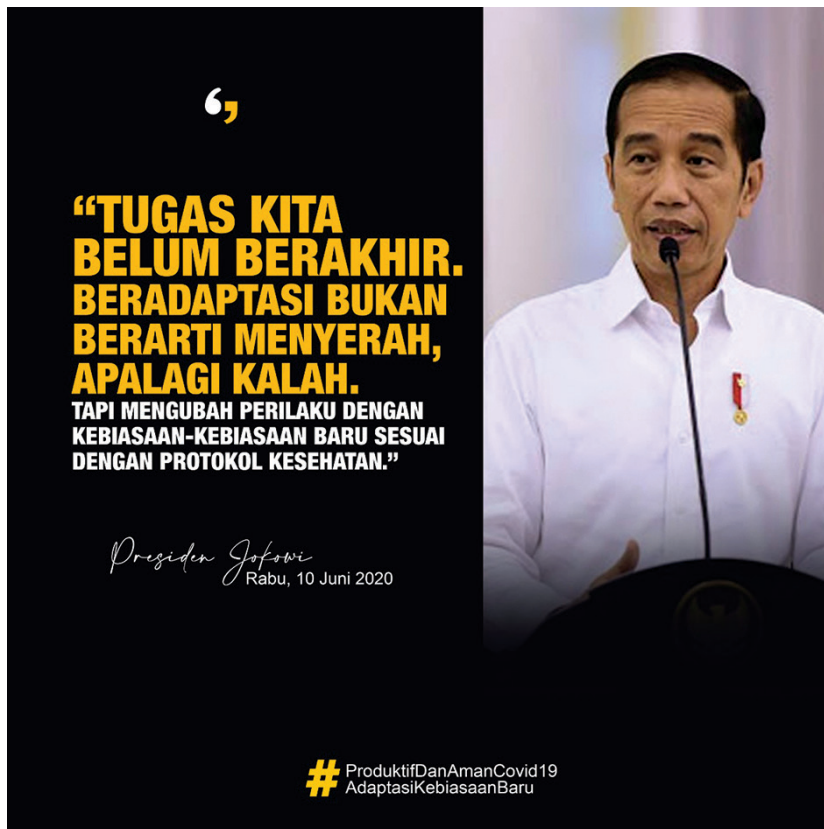
"Pada akhirnya tugas pemimpin adalah mencapai tujuan bersama," lanjut Agus. Namun, hasil sebuah

kepemimpinan tidak hanya dinilai pada pemimpinnya, tapi dinilai dari pelaksanaan tugas pokok yang melibatkan staf. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membuat stafnya menjadi lebih terampil dalam jabatannya serta efektif dan efisien dalam organisasi.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa kepemimpinan tingkat tinggi dan kemampuan manajerial harus memiliki sikap profesional dan berintegritas unggul. Setiap pimpinan tingkat tinggi juga harus paham perkembangan lingkungan strategis di Indonesia serta transformasional. Pemimpin juga harus mampu untuk merumuskan dan mengimplimentasi kebijakan publik karena kebijakan publik merupakan jembatan fungsi, potensi, dan kemampuan pemimpin yang menjadi sebuah produk bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa.

Dalam membuat kebijakan publik pemimpin harus memahami kondisi nasional agar dapat memahami akar masalah, memiliki pemahaman mengenai sistem nasional, dan memiliki visi masa depan. "Kepemimpinan akan menghadapi ketidakpastian dimana pun dan lingkup apapun, pemimpin harus kompeten untuk menghadapi ketidakpastian ini," tutup Agus.

Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru, Presiden Beri Lima Arah



Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru menuju fase masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19 saat meninjau Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Rabu (10/6), di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tugas besar kita belum berakhir. Beradaptasi bukan berarti menyerah, apalagi kalah. Tapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi juga aman dari penularan covid,” ungkap Presiden Joko Widodo

Adapun lima arahan tersebut yaitu, pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat.

Presiden menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, yakni penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, dan menjaga imunitas tubuh. Sehingga diharapkan kedisiplinan masyarakat saat masuk tatanan normal baru sudah benar-benar siap.

“Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada.” kata Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat

dan penentuan waktu yang tepat, yang berdasarkan data dan fakta di lapangan, dalam mengambil kebijakan. “Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakannya,” ujar Presiden Jokowi. Kemudian, Presiden meminta setiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Ketiga, Presiden mengingatkan mengenai penentuan prioritas harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. “Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua,” lanjut Presiden Jokowi.

Keempat, Presiden menginginkan agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah terus diperkuat, bahkan di tingkat Desa, RT, dan RW.

Kelima, Presiden meminta evaluasi selalu dilakukan secara rutin. Meskipun penambahan kasus baru di sebuah daerah sudah menurun, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak lengah karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Presiden yakin bahwa keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. “Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” ujar Presiden Jokowi.

Pancasila sebagai Obat Penawar Gerakan Radikal dan Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, M.H. memberikan ceramah dengan Judul "Penanganan Gerakan Radikal dan Terorisme di Indonesia", kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 61 pada Kamis (11/6), secara dalam jaringan (daring).

Boy menyatakan bahwa gerakan radikalisme dan gerakan yang mengarah pada perbuatan terorisme merupakan sebuah kejahatan global, kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang transnasional, dan dapat bahkan dapat dikatakan kejahatan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, menurut Boy, potensi ancaman terorisme pada dasarnya adalah sebuah pertarungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi anti Pancasila yang umumnya mendukung kekerasan.

Kemudian Boy menyampaikan beberapa hal yang menjadi akar permasalahan terorisme. Pertama adalah salah tafsir ajaran agama. Hal tersebut mendorong BNPT mengajak tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan hal-hal yang terkait ajaran agama agar tidak ada lagi kesalahan dalam memahami ajaran agama serta tidak akan mudah mengatasnamakan Tuhan dan agama dalam melakukan aksi-aksi terorisme.

Selanjutnya adalah adanya perspektif ketidakadilan. Munculnya rasa ketidakadilan di beberapa kalangan masyarakat membuat kalangan tersebut mudah dieksploitasi oleh suatu kelompok yang mau menjanjikan dukungan yang dibutuhkan, seperti dukungan ekonomi. Hal lainnya adalah adanya keinginan untuk balas dendam. Umumnya penyerangan teroris dilakukan bertempat di kantor Polisi atau bertepatan pada momentum



peringatan hari besar seperti Hari Pancasila. Hal tersebut dikarenakan adanya perasaan dan pemikiran bahwa unsur Polisi selama ini menghalangi gerakan-gerakan radikal dan terorisme tersebut.

Pada kesempatan tersebut Boy juga menyampaikan kebijakan BNPT yakni meniadakan potensi ancaman dan segala bentuk terorisme di wilayah NKRI. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, ada beberapa strategi yang telah disusun. Pertama adalah membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat serta kepedulian dalam mempersempit pelaku terorisme dan penyebaran paham radikalisme.

Selanjutnya adalah sinergitas seluruh unsur baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, dan tokoh pemerintahan dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah deradikalisasi dan re-edukasi terhadap para narapidana terorisme dan mantan narapidana

terorisme secara berkesinambungan. BNPT juga memiliki strategi terbaru yang sedang dikembangkan yakni melalui pendekatan kultur dan seni budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Boy yang juga merupakan alumnus Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 19 tahun 2013 mengajak seluruh peserta untuk sama-sama menjaga keutuhan NKRI dari segala tantangan. Menurut Boy, peserta Lemhannas RI disiapkan untuk menjadi kader-kader pemimpin nasional yang diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan, berwawasan nasional, dan dapat menjalankan roda organisasi.

"Dengan bekal selama pendidikan di Lemhannas RI maka memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang holistik dan integral, dengan pendekatan komprehensif, diharapkan rekan-rekan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkup tugas masing-masing," ujar Boy.

Sektor Perdagangan Guna Memajukan Perekonomian Nasional



Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto saat memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, pada Selasa (16/6) secara daring (daring).

Dalam ceramahnya, Agus menyampaikan bahwa mencermati situasi perdagangan global dan dipengaruhi situasi pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Bank Dunia dan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berkisar di angka 0% hingga 3,9%.

Di sisi lain, peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional bahkan saat ini Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Demokrasi yang dinamis dan memiliki posisi serta peran penting dalam berbagai forum internasional berpengaruh kuat terhadap perkembangan dan arah kebijakan kerja sama ekonomi internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga berada

dalam posisi unik yakni memiliki tanggung jawab untuk mewakili negara berkembang dalam berbagai forum dan kerja sama internasional. Posisi tersebut dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya tercatat cukup tinggi di antara negara-negara berkembang lainnya. "Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peranan penting di panggung pembangunan dunia," ujar Agus.

Pada forum-forum internasional, Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara yang mampu mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Saat ini pemerintah telah melakukan kerja sama internasional dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. "Kerja sama internasional Indonesia akan selalu diarahkan untuk menjadi sarana bagi peningkatan akses industri dalam negeri," tutur Agus.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan akses pasar produk industri dalam negeri

ke pasar internasional. Diantaranya adalah kerja sama perdagangan, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, kemudian promosi luar negeri, kerja sama pengakuan standar, serta kerja sama peningkatan akses pasar bagi produk industri nasional. Namun demikian, upaya-upaya tersebut dirasakan masih perlu ditingkatkan lagi dengan berbagai kebijakan.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak bagi perdagangan baik tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, Covid-19 berdampak pada perubahan pola perdagangan global, peningkatan biaya logistik, membuat kerja sama perdagangan tidak efektif, bahkan ancaman resesi ekonomi global. Sedangkan di tingkat nasional Covid-19 menimbulkan dampak potensi inflasi barang pokok dan penting akibat terganggunya logistik dan distribusi, terganggunya perdagangan antarpulau, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Tantangan perdagangan global dan nasional dimasa yang akan datang tentu akan semakin kompleks dan diikuti dengan ketidakpastian. Saat ini, era normal baru harus dihadapi bersama dengan inovasi dan adaptasi secara terus menerus. "Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat sekaligus mengamankan perekonomian nasional dalam memasuki normal baru," kata Agus.

Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan Sosial



Oleh karena itu, jaminan sosial bidang kesehatan menjadi penting untuk dibahas karena tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.

Direktur Utama Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS)

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60, Rabu, 17 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut Fachmi menyampaikan topik "Menggapai Kesejahteraan Sosial Melalui Jaminan Sosial Bidang Kesehatan".

Fachmi yang merupakan alumnus PPRA 45 tahun 2010, menjelaskan bahwa bicara tentang ketahanan nasional salah satunya bisa dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Oleh karena itu, jaminan sosial bidang kesehatan menjadi penting untuk dibahas karena tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial. Salah satunya dapat dilihat dari presentase gini ratio. Pada 2011 gini ratio berada rata-rata diangka 0,4. Menurut Fachmi, angka tersebut menunjukkan ketimpangan sosial yang cukup besar. "Kalau ketimpangan sosial besar bisa terjadi kecemburuan sosial yang bisa berbahaya buat negara," kata Fachmi.

Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah, salah satunya adalah program jaminan kesehatan. Kemudian angka gini ratio semakin turun hingga pada tahun 2018 angka gini ratio menjadi 0,389. "Dari beberapa program, ternyata jaminan kesehatan berkontribusi hampir 15% dari penurunan gini ratio," ujar Fachmi.

Namun, keberhasilan tersebut tertutup oleh isu defisit. Padahal pemerintah menjalankan berbagai cara sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, walaupun diakui memang ada terjadi keterlambatan pembayaran kepada rumah sakit yang membuat isu defisit menjadi perbincangan. Disisi lain, sebenarnya BPJS menghadapi tantangan nyata, yakni sulitnya perluasan cakupan kepesertaan. Harus diakui bahwa tidak mudah membuat semua orang mengikuti program jaminan kesehatan karena masih ada pola pikir tidak akan mendapatkan apa-apa.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan memang tidak menanggung pembiayaan karena pembiayaan Covid-19 ditanggung oleh Kementerian Kesehatan RI. Namun, BPJS Kesehatan tetap melakukan beberapa penyesuaian pelayanan yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti *physical distancing*. Dalam menghadapi Covid-19, BPJS mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi seperti melalui aplikasi, care center, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Digital.

Diakhir ceramahnya Fachmi menjelaskan bahwa keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan jaminan sosial adalah 3 hal yang saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. "Tiada keadilan

sosial tanpa kesejahteraan sosial. Tiada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial" ujar Fachmi menutup ceramahnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dan BPJS

Pada hari yang sama, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes menandatangani Nota Kesepahaman, pada Rabu (17/6), di Ruang Nusantara Lemhannas RI.

Tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua instansi. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi beberapa hal, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pertukaran informasi, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan. Terakhir adalah Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta pendidikan Lemhannas RI yang berasal dari dalam negeri.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut menerapkan protokol kesehatan seperti hanya disaksikan oleh beberapa perwakilan jajaran Lemhannas RI dan BPJS Kesehatan dengan menerapkan *physical distancing*.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Sugeng Santoso** Redaktur: **Adri Koesdyanto**

Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**

Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**

Sekretariat: **Irina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**

Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>